## PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Dinas Arsip dan Perpustakaan

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Parit Malintang, 26 Juni 2026**

PADANG PARIAMAN

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

**Budi Mulya, ST., M.Eng**
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

| Paraf Verifikasi | |
|---|---|
| Ka. Bapelitbangda | |
| Inspektur | |
| Kabag Organisasi | |

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

# RENCANA KERJA PERUBAHAN

## (RENJA PERUBAHAN)

## 2025

## DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

## TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
**Jalan Ahmad Yani No. 21 Pariaman Telp & Fax (0751) 93916 Kode Pos 25512**

**KEPUTUSAN**
**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
NOMOR : 050.11/034/KEP/Dis.Arsip&Perpus/ IX/2025
**T E N T A N G**
**RENCANA KERJA PERUBAHAN**
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);

9. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Nomor NOMOR : 050.11/257/KEP/Dis.Arsip&Perpus/IX/2021 Tentang Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

1. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kabupaten Padang Pariaman Tentang Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025.

2. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 sebagimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

3. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :

   a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.
   b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman
   c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
   d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.

4. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.

5. Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, Anggaran Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal, 20 September 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**Dra.SUMARNI,M.Pd**
Pembina Utama Muda/NIP.196810231993032002

# KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi. Kebijakan, dan program dan kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan demi terwujudnya visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, 20 September 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

**Dra.SUMARNI,M.Pd**
Pembina Utama Muda/NIP.196810231993032002

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**


| | | |
|---|---|---|
| BAB 1 | PENDAHULUAN | |
| | 1.Latar Belakang..... | 1 |
| | 2.Landasan Hukum..... | 7 |
| | 3.Maksud dan Tujuan..... | 10 |
| | 4.Sistemmatika Penulisan..... | 10 |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | |
| | 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah..... | 15 |
| | 2.Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 45 |
| | 3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... | 58 |
| | 4.Review Terhadap Rancangan Awal Renja..... | 70 |
| | 5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 76 |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PRGOGRAM DAN KEGIATAN | |
| | 1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... | 77 |
| | 2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... | 76 |
| | 3.Program dan Kegiatan..... | 82 |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... | 104 |
| BAB V | PENUTUP..... | 174 |

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 (TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
2. Tabel 2.2 (TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Review Terhadap Rancangan Awal 2026
4. Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026
5. Tabel 3.3 (TC. 33) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
6. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja Perubahan PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja Perubahan PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja Perubahan PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja Perubahan PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja Perubahan PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja Perubahan PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan

prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja Perubahan PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perubahan PD merinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perubahan PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja Perubahan PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Perubahan PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja Perubahan PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja Perubahan PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja Perubahan PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (resultbased management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja Perubahan PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah

yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja Perubahan PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draf Renja Perubahan PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja Perubahan PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja Perubahan PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD Perubahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja Perubahan PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.Selain itu, Renja Perubahan PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh olehperangkat daerah untuk mencapai target

pembangunan yang ditetapkan. Renja Perubahan PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Perubahan PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja Perubahan PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja Perubahan PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja Perubahan PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja Perubahan PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja Perubahan PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD Perubahan ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA PD

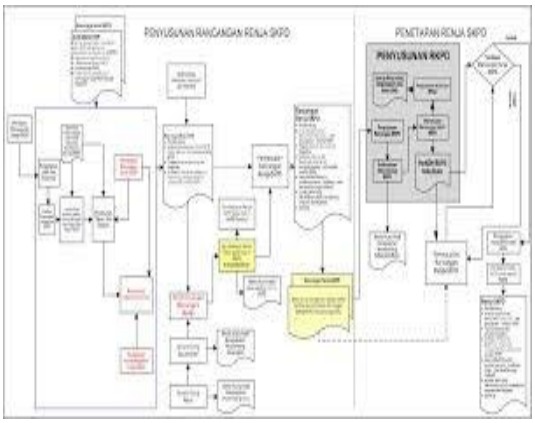

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan

a. **Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029**

   Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

   RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja ini memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

**b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, apabila RKPD memiliki prioritas dalam bidang kesejahteraan rakyat, maka Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan mencakup program seperti Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Program perekonomian dan pembangunan, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang target

indikatornya menunjang pencapaian prioritas RKPD. Dengan demikian, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

**c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029**

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renstra tahun 2025-2029 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka

pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

## 1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);

5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

9) Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);

19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);

20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026;

23) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomr 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

24) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

25) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

26) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

27) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

28) Peraturan ANRI No. 1 Tahun 2023: tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis

29) Peraturan ANRI No. 5 Tahun 2025: tentang Jenis Naskah Dinas

30) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum

31) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

**Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;

3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Perubahan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PERANGKAT DAERAH dan

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub Bab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

**3.1** Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

**3.2** Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perubahan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3** Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

# BAB II
# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja PD yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja PD dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dan DPA Tahun 2024. Total realisasi belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp4.108.107.936,00 Jumlah tersebut mencapai 93,40% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.393.993.350,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja

pegawai sebesar Rp2.911.665.383,00 atau 95,33%, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.017.457.753,00 atau 87,69%, dan realisasi belanja modal sebesar Rp178.984.800,00 atau 99,71% dari jumlah anggarannya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PENCAPAIAN KINERJA | | | ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | SATUAN | | (RP) | (%) |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 3,50 | 51 | Rasio | 90.145.000,00 | 87.696.500,00 | 97,28% |
| | | .0,85 | 12.86 | % | | | |
| | | 21.482. | 57.523 | Jumlah | | | |
| | | 0.20 | 0.3 | Rasio | | | |
| | | 0.40 | 14.60 | % | | | |
| | | 0.50 | 1.15 | % | | | |
| | Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25 | 14 | Jumlah | 57.145.000,00 | 54.853.500,00 | 95,99% |
| | | 800 | 1.700 | Eksemplar | | | |
| | | 1500 | 5.760 | Jumlah | | | |
| | | 8 | 7 | Jumlah | | | |
| 1 | Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik | 50 | 6 | Pustaka | 25.845.000,00. | 24.482.600,00 | 94.73% |
| 2 | Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten /kota sesuai dengan standar nasionla perpustakaan | 34 | 13 | Pustaka | 31.300.000,00 | 30.370.900,00 | 97,03% |
| | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 16 | 16 | Jumlah | 33.000.000,00 | 32.843.000,00 | 99,52% |
| | | 350 | 350 | Jumlah | | | |
| 1 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 17 | 14 | Peserta | 33.000.000,00 | 32.843.000,00 | 99,52% |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 100 | 100 | % | 37.929.805,00 | 24.415.000,00 | 64,37% |
| | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | 20 | 10 | Naskah Kuno | 37.929.805,00 | 24.415.000,00 | 64,37% |
| 1 | Pengembangan, Pengolah, Pengalihmediaan Naskah kuno yang | 20 | 10 | Naskah Kuno | 37.929.805,00 | 24.415.000,00 | 64,37% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | | | | | | |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 55 | 55.29 | % | 10.214.000,00 | 4.251.600,00 | 41,63% |
| | | 45 | 47,65 | % | | | |
| | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | 5 | 0 | Jumlah | 10.214.000,00 | 4.251.600,00 | 41,63% |
| | | 10 | 0 | % | | | |
| 1 | Penilaian dan Penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun. | 10 | 0 | JRA | 10.214.000,00 | 4.251.600,00 | 41,63% |

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PENCAPAIAN KINERJA | | | ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | SATUAN | | (RP) | (%) |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100 | 100 | % | 3.365.910.190,00 | 3.150.732.827,00 | 93,61% |
| | | A | A | A | | | |
| | | 100 | 100 | % | | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | 44.755.000,00 | 39.903.00,00 | 89,15% |
| | | 100 | 100 | % | | | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah | 4 | 4 | Dokumen | 23.000.000,00 | 19.613.000,00 | 85,27% |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 | 10 | Dokumen | 22.755.000,00 | 20.290.000,00 | 89,17% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | 3.055.199.510,00 | 2.914.565.383,00 | 95,40% |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | 1 | Tahun | 2.969.334.510,00 | 2.828.805.383,00 | 95,27% |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | 1 | Tahun | 80.835.000,00 | 80.820.000,00 | 99,98% |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | 1 | 1 | Dokumen | 4.950.000,00 | 4.940.000,00 | 99,80% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 100 | % | 66.931.840,00 | 51.987.210,00 | 77,67% |
| 1 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | Tahun | 66.931.840,00 | 51.987.210,00 | 77,67% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | % | 199.023.840,00 | 180.189.934,00 | 90,54% |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Tahun | 1 Tahun | Tahun | 48.000.000,00 | 29.379.934,00 | 61.21% |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Tahun | 1 Tahun | Tahun | 151.023.840,00 | 150.810.000,00 | 99,86% |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 3,50 | 51 | Rasio | 827.079.447,00 | 749.357.809,00 | 90,60% |
| | | .0,85 | 12.86 | % | | | |
| | | 21.482. | 57.523 | Jumlah | | | |
| | | 0.20 | 0.3 | Rasio | | | |
| | | 0.40 | 14.60 | % | | | |
| | | 0.50 | 1.15 | % | | | |
| | Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25 | 14 | Jumlah | 688.045.247,00 | 615.578.392,00 | 89,47% |
| | | 800 | 1.700 | Eksemplar | | | |
| | | 1500 | 5.760 | Jumlah | | | |
| | | 8 | 7 | Jumlah | | | |
| 1 | Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota | 1 dan50 | 1 dan 50 | Pustaka dan Lokasi | 471.585.247,00 | 406.714.392,00 | 86,24% |
| 2 | Pengembangan Bahan Pustaka | 500 | 500 | Eksemplar | 176.500.000,00 | 174.359.800,00 | 98,79% |
| 3 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | 1 | Dokumen | 39.960.000,00 | 34.504.200,00 | 86,35% |
| | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 16 | 16 | Jumlah | 139.034.200,00 | 133.779.417,00 | 96,22% |
| | | 350 | 350 | Jumlah | | | |
| 1 | Pemberian penghargaan gerakan budaya membaca | 74 | 74 | Peserta | 83.000.000,00 | 81.446.539,00 | 98.13% |
| 2 | Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial | 152 | 152 | Peserta | 56.034.200,00 | 52.332.878,00 | 93,39% |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 68.50 | 68.50 | % | 9.589.160,00 | 9.468.500,00 | 98,74% |
| | | 20.95 | 20.95 | % | | | |
| | | 85 | 20.95 | % | 9.589.160,00 | 9.468.500,00 | 98,74% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 50 | 0 | % | | | |
| | | 50 | 0 | % | | | |
| 1 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | 25 | 25 | OPD | 9.589.160,00 | 9.468.500,00 | 98,74% |
| | | | | | | | |

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

| NO | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | PENCAPAIAN KINERJA | | | ANGGARAN (RP) | REALISASI ANGGARAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TARGET | REALISASI | SATUAN | | (RP) | (%) |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 3,50 | 51 | Rasio | 50.000.000,00 | 45.322.200,00 | 90,64% |
| | | .0,85 | 12.86 | % | | | |
| | | 21.482. | 57.523 | Jumlah | | | |
| | | 0.20 | 0.3 | Rasio | | | |
| | | 0.40 | 14.60 | % | | | |
| | | 0.50 | 1.15 | % | | | |
| | Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 25 | 14 | Jumlah | 25.000.000,00 | 24.572.200,00 | 98,29% |
| | | 800 | 1.700 | Eksemplar | | | |
| | | 1500 | 5.760 | Jumlah | | | |
| 1 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 500 | 1100 | Eksemplar | 25.000.000,00 | 24.572.200,00 | 98,29% |
| | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 16 | 16 | Jumlah | 25.000.000,00 | 20.750.000,00 | 83,00% |
| | | 350 | 350 | Jumlah | | | |
| 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta Masyarakat | 50 | 68 | Peserta | 25.000.000,00 | 20.750.000,00 | 83,00% |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 55 | 55.29 | % | 7.360.000,00 | 7.279.000,00 | 98.90% |
| | | 45 | 47,65 | % | | | |
| | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 25 | 12 | Nagari | 7.360.000,00 | 7.279.000,00 | 98.90% |
| 1 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | 100 | 154 | Arsip | 7.360.000,00 | 7.279.000,00 | 98.90% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Tidak adanya ketersediaan anggaran, di haruskan kegiatan tersebut tidak laksanakan seperti kegiatan-kegiatan pada urusan kearsipan.
b. Dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang indikator nya belum sesuai dengan yang di jalankan sehingga tidak optimalnya capaian target yang di jalankan oleh bidang tersebut.
c. adanya kegiatan yang tidak optimal capaian targetnya dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga target yang ditetapkan di awal tahun tidak tercapai.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Dinas Kearsipann dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) PD disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Dinas dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.
b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di antaranuya:

a. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan agar permasalahan yang timbul dalam tahap pelaksanaannya nanti dapat diminimalisir.

b. Mempertimbangkan dengan baik hasil monitoring dan evaliasi ataupun target pencapaian program/kegiatan yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan.
c. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2026.
d. Melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Dinas bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2026.
e. Melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra. Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman

Periode Pelaksanaan: 2024

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)RENSTRA/Kegiatan (output) RENJA | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-4) Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-2) yang dievaluasi Tahun 2024 | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggranrenja tahun 2023 | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 sd 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13=12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5 *100 | | 16 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | | **Program Pembinaan Perpustakaan** | **1. Rasio ketercukupan koleksi dengan populasi** | **3,8** | **875.485.000** | **50,9** | **193.665.300** | **95,3** | **770.190.247** | **0** | **23.836.600** | **0** | **41.434.250** | **25,9** | **1.132.494.199** | **25** | **456.538.698** | **50,9** | **1.654.303.747** | **53** | **215** | **101,8** | **1.847.969.047,0** | **2678,9** | **211%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **2. Persentase jumlah kunjungan masyarakat ke Perpustakaan,** | **1** | | **0,37** | - | **3** | | 36 | | 43 | | 48 | | 51 | | **178** | | **5.933** | | **178,37** | | **17837** | | |
| | | | **3. Persentase anggota perpustakaan** | **3,5** | | **5,6** | - | **0,5** | | 263 | | 559 | | 853 | | 1154 | | **2829** | | **565.800** | | **2834,6** | | **80989** | | |
| | | | **4. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan,** | **25** | | **0,04** | - | **0,2** | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | 0,2 | | **0,8** | | **400** | | **0,84** | | **3,36** | | |
| | | | **5. Persentase perpustakaan sesuai SNP,** | **25** | | **1,61** | - | **0,4** | | 5,7 | | 7,2 | | 11,84 | | 14,6 | | **39,34** | | **9.835** | | **40,95** | | **163,8** | | |
| | | | **6. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat** | **25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | *Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | 1.Jumlah perpustakaan umum yang menggunakan aplikasi berbasis IT | 40 | **547.410.000** | **57,5** | **104.272.050** | 30 | **730.230.247** | 0 | **19.876.600** | 23,33 | **33.487.250** | 34,17 | **1.083.539.550** | 0 | **362.870.930** | **57,5** | **1.499.774.330** | **192** | **205** | **115** | **1.604.046.380** | **287,5** | **293%** | |
| | | | 2. Jumlah koleksi bahan pustaka | 15 | | **15** | - | 50 | | 49,5 | | 49,5 | | 49,5 | | 49,5 | | **198** | | **396** | | **213** | | **1420** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3. Jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan | 226410 | | **0,06** | - | 10000000 | | 2500 | | 2500 | | 2500 | | 2500 | | **10000** | | **0** | | **100000** | | **4,4168** | | |
| | | | 4.Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar Nasional Perpustakaan | 52 | | **6** | - | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | **5** | | **50** | | **11** | | **21,154** | | |
| | | *Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik* | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 240 | **175.500.000** | **40** | **24.052.950** | 15 | **25.845.000** | 0 | **1.390.600** | 0 | - | 7 | **130.552.400** | 0 | **19.382.000** | **7** | **151.325.000** | **47** | **586** | **47** | **175.377.950** | **19,583** | **100%** | |
| | | *Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di | 300 | **175.000.000** | **60** | **23.694.600** | 50 | **471.585.247** | 0 | **18.006.000** | 15 | **30.508.750** | 25 | **931.997.150** | 10 | **173.307.430** | **50** | **1.153.819.330** | **100** | **245** | **110** | **1.177.513.930** | **36,667** | **6733%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan* | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 60 | **196.910.000** | **10** | **19.653.600** | 30 | **31.300.000** | 0 | | 0 | - | 11 | **14.322.000** | 11 | **26.640.000** | **22** | **40.962.000** | 73 | 131 | **32** | **60.615.600** | **53,333** | **31%** | |
| | | *Pengembangan Bahan Pustaka* | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | 2400 | **210.000.000** | **400** | **29.958.000** | 500 | **176.500.000** | 0 | **480.000** | 0 | - | 0 | **3.205.000** | 500 | **121.947.800** | **500** | **125.632.800** | 100 | 71 | **900** | **155.590.800** | **37,5** | **74%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka* | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 2400 | **100.000.000** | **260** | **6.912.900** | 500 | **25.000.000** | 0 | | 50 | **2.978.500** | 100 | **3.463.000** | 110 | **21.593.700** | **260** | **28.035.200** | **52** | **112** | **520** | **34.948.100** | **21,667** | **35%** | |
| | | *Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota* | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 100 | | | **2.170.000** | | | | | | **4.390.000** | | | | | | | | | |
| 2 | | *Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | 1.Jumlah pengharggaan kegemaran membaca | 20 | **328.075.000** | **25** | **89.393.250** | 12 | **39.960.000** | 0 | **3.960.000** | 25 | **7.947.000** | 0 | **48.954.649** | | **93.667.768** | **25** | **154.529.417** | **208** | **387** | **50** | **243.922.667** | **250** | **74%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.Jumlah pelibatan kegiatan masyarakat di Perpustakaan wilayah Kabupaten Padang Pariaman | 5000 | | **25** | - | 800 | | 0 | | 0 | | 0 | | 25 | | **25** | | **3** | | **50** | | **1** | | |
| | | *Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus serta Masyarakat* | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 250 | **150.000.000** | **68** | **29.924.000** | 1 | **25.000.000** | 0 | **3.960.000** | 0 | **7.947.000** | 1 | **8.843.000** | 0 | - | **1** | **20.750.000** | **100** | **83** | **69** | **50.674.000** | **27,6** | **34%** | |
| | | *Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca* | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 204 | **149.925.000** | **34** | **24.867.650** | 16 | **83.000.000** | 0 | - | 0 | - | **16** | **24.709.439** | 0 | **56.737.100** | **16** | **81.446.539** | **100** | **98** | **50** | **106.314.189** | **24,51** | **71%** | |
| | | *Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial* | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota | 300 | **178.150.000** | **173** | **34.601.600** | 25 | **56.034.200** | 0 | - | 0 | - | 25 | **15.402.210** | 0 | **36.930.668** | **25** | **52.332.878** | **100** | **93** | **198** | **86.934.478** | **66** | **49%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yang Dikembangkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota* | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | | | **0** | - | 1 % | **33.000.000** | | | | | **0** | **4.245.000** | | **28.598.000** | **0** | **32.843.000** | | | **0** | **32.843.000** | | | |
| i i . | | ***Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno*** | **Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang diakuisisi/dialihmediakan (digitalisasi/terdaftar)** | **60** | **220.000.000** | **35** | **16.212.600** | **30** | **32.775.553** | 0 | - | 0 | - | 0 | **3.770.000** | 35 | **14.316.800** | **35** | **18.086.800** | **117** | **55** | **70** | **34.299.400** | **116,67** | **16 %** | |
| 1 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya, Jumlah koleksi budaya | 80 | **220.000.000** | **7** | **16.212.600** | 5 | **32.775.553** | 0 | - | 0 | - | 0 | **3.770.000** | 7 | **14.316.800** | **7** | **18.086.800** | **140** | **55** | **14** | **34.299.400** | **17,5** | **16 %** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno* | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 120 | **120.000.000** | **25** | **16.212.600** | 20 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25 | - | **25** | - | **125** | **#DIV/0!** | **50** | **16.212.600** | **41,667** | **14%** | |
| | | *Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didaya* | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 100 | **100.000.000** | **7** | - | 10 | **32.775.553** | 0 | - | 0 | - | 3 | **3.770.000** | 7 | **14.316.800** | **10** | | **100** | | **17** | | **17** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *gunakan* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **0** | - | | | | | | | | | | | **0** | - | | | **0** | - | | | |
| iii. | | ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*** | **1. Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah** | 100 | **21.112.120.328** | **100** | **3.054.246.396** | 100 | **3.728.634.764** | 25 | **1.101.734.614** | 25 | **800.425.545** | 25 | **478.299.581** | 25 | | **100** | **2.380.459.740** | **100** | **64** | **200** | **5.434.706.136** | **200** | **26%** | |
| | | | **2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat** | A | | **0** | - | B | | 0 | | 0 | | A | | 0 | | **A** | | **A** | | **A** | | **A** | | |
| | | | **3.Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti** | 100 | | **100** | - | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | **100** | | **100** | | **200** | | **200** | | |
| 1 | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja* | 1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu | 100 | **450.000.000** | **100** | **92.766.490** | 100 | **74.000.000** | 25 | **3.710.000** | 25 | **3.476.000** | 25 | **9.847.000** | 25 | **22.870.000** | **100** | **39.903.000** | **100** | **54** | **200** | **132.669.490** | **200** | **29%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Perangkat Daerah* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 | **150.000.000** | **2** | **42.397.640** | 6 | **40.000.000** | 1 | **1.250.000** | 1 | **2.343.000** | 0 | **7.140.000** | 0 | **8.880.000** | **2** | **19.613.000** | **33** | **49** | **4** | **62.010.640** | **33,333** | **41%** | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60 | **300.000.000** | **10** | **50.368.850** | 10 | **34.000.000** | 6 | **2.460.000** | 6 | **1.133.000** | 4 | **2.707.000** | | **13.990.000** | **16** | **20.290.000** | **160** | **60** | **26** | **70.658.850** | **43,333** | **24%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan | 100 | **16.197.598.328** | **100** | **2.710.859.945** | **100** | **3.379.804.124** | 20 | **1.038.166.328** | 25 | **760.979.085** | 25 | **423.240.354** | 30 | **692.179.616** | **100** | **2.914.565.383** | **100** | **86** | **200** | **5.625.425.328** | **200** | **35%** | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 84 | **15.601.358.328** | **14** | **2.610.848.945** | 14 | **3.283.969.124** | 3 | **1.007.166.328** | 3 | **752.459.085** | 5 | **402.150.354** | 3 | **667.029.616** | **14** | **2.828.805.383** | **100** | **86** | **28** | **5.439.654.328** | **33,333** | **35%** | |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 72 | **446.240.000** | **12** | **83.040.000** | 1 | **80.835.000** | 3 | **27.550.000** | 3 | **7.030.000** | 3 | **21.090.000** | 3 | **25.150.000** | **12** | **80.820.000** | **1.200** | **100** | **24** | **163.860.000** | **33,333** | **37%** | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 6 | **150.000.000** | **1** | **16.971.000** | **1** | **15.000.000** | 0 | 3.450.000 | 1 | **1.490.000** | 0 | - | 0 | - | **1** | **4.940.000** | **100** | **33** | **2** | **21.911.000** | **33,333** | **15%** | |
| 3 | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai | 100 | **175.000.000** | **85** | **16.740.000** | **100** | - | 0 | - | 25 | - | 30 | - | 30 | - | **85** | - | **85** | **#DIV/0!** | **170** | **16.740.000** | **170** | **10%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Pelatihan | 48 | **175.000.000** | **8** | **16.740.000** | 29 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | - | **8** | - | **28** | **#DIV/0!** | **16** | **16.740.000** | **33,333** | **10%** | |
| 4 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi | 100 | **1.554.726.000** | **100** | **212.672.726** | **100** | **100.806.800** | 0 | - | 25 | **17.954.400** | 25 | **4.218.000** | 50 | **31.914.810** | **100** | **54.087.210** | **100** | **54** | **200** | **266.759.936** | **200** | **17%** | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | **250.000.000** | **8** | **19.314.000** | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | - | **8** | - | **800** | **#DIV/0!** | **16** | **19.314.000** | **26,667** | **8%** | |
| | | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 72 | **95.122.000** | **12** | **12.996.600** | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | **12** | - | **100** | **#DIV/0!** | **24** | **12.996.600** | **33,333** | **14%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan* | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 72 | **47.200.000** | **12** | **5.720.000** | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | **12** | - | **100** | **#DIV/0!** | **24** | **5.720.000** | **33,333** | **12%** | |
| | | *Fasilitasi Kunjungan Tamu* | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 72 | **30.060.000** | **6** | **5.006.100** | 12 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 3 | - | **6** | - | **50** | **#DIV/0!** | **12** | **5.006.100** | **16,667** | **17%** | |
| | | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 72 | **1.132.344.000** | **12** | **169.636.026** | 12 | **100.806.800** | 3 | - | 3 | **17.954.400** | 3 | **4.218.000** | 3 | **31.914.810** | **12** | **54.087.210** | **100** | **54** | **24** | **223.723.236** | **33,333** | **20%** | |
| 5 | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah | 100 | **139.000.000** | **100** | **27.764.350** | **100** | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | **100** | - | **100** | **#DIV/0!** | **200** | **27.764.350** | **200** | **20%** | |
| | | *Penggadaan Kendaraan Peroangan Dinas atau Kendaraan* | Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang tersedia | 7 | **139.000.000** | **12** | **27.764.350** | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | **12** | - | **100** | **#DIV/0!** | **24** | **27.764.350** | **342,86** | **20%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Dinas Jabatan* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | 1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia | 100 | **1.662.122.000** | **12** | **219.182.190** | 12 | **174.023.840** | 3 | **59.858.286** | 3 | **18.016.060** | 3 | **40.994.227** | 3 | **61.321.361** | **12** | **180.189.934** | **100** | **104** | **24** | **399.372.124** | **24** | **24 %** | |
| | | | 2. Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 72 | **156.429.000** | **12** | **15.914.000** | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | **12** | - | **100** | **#DIV/0!** | **24** | **15.914.000** | **33,333** | **10 %** | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 72 | **267.800.000** | **100** | **16.570.790** | 14 | **23.000.000** | 3 | **9.723.286** | 3 | **5.313.560** | 3 | **3.494.227** | 3 | 10.848.861 | **12** | **29.379.934** | **86** | **128** | **112** | **45.950.724** | **155,56** | **17 %** | |
| | | *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor* | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 72 | **1.237.893.000** | **1** | **186.697.400** | 1 | **151.023.840** | 3 | **50.135.000** | 3 | **12.702.500** | 3 | **37.500.000** | 3 | 50.472.500 | **12** | **150.810.000** | **1.200** | **100** | **13** | **337.507.400** | **18,056** | **27 %** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | **1.072.674.000** | **75** | **1.729.652.917** | **100** | - | 25 | - | 25 | - | 25 | - | | - | **75** | - | **75** | **#DIV/0!** | **150** | **1.729.652.917** | **150** | **161%** | |
| | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan* | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibayarkan | 16 | **736.497.000** | **9** | **90.431.345** | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | | - | **9** | - | **300** | **#DIV/0!** | **18** | **90.431.345** | **112,5** | **12%** | |
| | | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional* | Jumlah kendaraan operasional perpustakaan/perpustakaan keliling yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang | 12 | **109.340.000** | **2** | **16.480.000** | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | - | | - | **2** | - | **100** | **#DIV/0!** | **4** | **16.480.000** | **33,333** | **15%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *atau Lapangan* | dibayarkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya* | Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 72 | **59.995.000** | **9** | **12.758.410** | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | | - | **9** | - | **75** | **#DIV/0!** | **18** | **12.758.410** | **25** | **21%** | |
| | | *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya* | Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan | 72 | **166.842.000** | **6** | **1.609.983.162** | 12 | - | 0 | - | 3 | - | 3 | - | | - | **6** | - | **50** | **#DIV/0!** | **12** | **1.609.983.162** | **16,667** | **965%** | |
| | | | | | | **0** | - | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | |
| IV. | | ***Program Pengelolaan Arsip*** | **1.Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip** | **70** | **781.270.000** | **70** | **83.120.651** | **60,95** | **9.589.160** | 0 | | 0 | **12.954.550** | 0 | - | 70 | - | **70** | **12.954.550** | **115** | **135** | **140** | **96.075.201** | **200** | **12%** | |
| | | | **2.Persentase PD yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik** | **23,25** | | **12** | - | **18,6** | | 0 | | 0 | | 12 | | 0 | | **12** | | **65** | | **24** | | **103,23** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | *Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota* | 1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku | **85** | **587.120.000** | **37** | **47.217.500** | **85** | **9.589.160** | 0 | **9.468.500** | 0 | **5.192.000** | 25 | - | 12 | - | **37** | **14.660.500** | **44** | **153** | **74** | **61.878.000** | **87,059** | **11%** | |
| | | | 2.Persentase pengelola Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | **50** | | **25** | - | **50** | | 0 | | 0 | | 0 | | 25 | | **25** | | **50** | | **50** | | **100** | | |
| | | | 3.Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi | **50** | | **25** | - | **50** | | 0 | | 0 | | 0 | | 25 | | **25** | | **50** | | **50** | | **100** | | |
| | | *Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis* | Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis | 240 | **206.300.000** | **25** | **29.752.500** | 25 | **9.589.160** | 26 | **9.468.500** | 0 | **3.400.000** | 25 | - | 0 | - | **51** | **12.868.500** | **204** | **134** | **76** | **42.621.000** | **31,667** | **21%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis OPD (Pencipta arsip)/sosialisasi tata kelola kearsipan | 240 | **174.520.000** | **0** | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | | 0 | - | - | **#DIV/0!** | **0** | - | **0** | **0%** | |
| | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD yang diawasi dan diaudit dalam pengelolaan kearsipan dinamis | 150 | **206.300.000** | **25** | **29.518.200** | 25 | - | 0 | - | 0 | **1.792.000** | 0 | - | 25 | - | **25** | **1.792.000** | **100** | **#DIV/0!** | **50** | **31.310.200** | **33,333** | **15%** | |
| 2 | | *Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota* | 1. Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi | 20 | **150.000.000** | **58** | **21.056.307** | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 10 | - | 48 | - | **58** | - | **580** | **#DIV/0!** | **116** | **21.056.307** | **580** | **14%** | |
| | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah pengolahan arsip dan preservasi arsip statis di depo arsip | 1000 | **150.000.000** | **79** | **21.056.307** | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 79 | - | **79** | - | - | **#DIV/0!** | **158** | **21.056.307** | **15,8** | **14%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN | 15 | **194.150.000** | **0** | **14.846.844** | 10 | - | 0 | - | 0 | **7.762.550** | 0 | - | 0 | - | **0** | **7.762.550** | - | **#DIV/0!** | **0** | **22.609.394** | **0** | **12%** | |
| | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN | 25 | **194.150.000** | **0** | **14.846.844** | 2 | - | 0 | - | 0 | **7.762.550** | 0 | - | 0 | - | **0** | **7.762.550** | - | **#DIV/0!** | **0** | **22.609.394** | **0** | **12%** | |
| | | | | | | **0** | - | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | |
| V. | | **Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip** | **1.Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan** | **70** | **716.998.000** | **58,52** | **99.649.746** | **55** | **17.574.000** | 0 | | 0 | **1.328.800** | 58,52 | - | 0 | - | **58,52** | **1.328.800** | **106** | **8** | **117,04** | **100.978.546** | **167,2** | **14%** | |
| | | | **2. Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih** | **70** | | **70** | - | **45** | | 0 | | 0 | | 70 | | 0 | | **70** | | **156** | | **140** | | **200** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **mediakan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | 1. Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan | **30** | **194.525.000** | **1** | **22.935.900** | 5 | **10.214.000** | 10 | - | 0 | **1.328.800** | 1 | - | 0 | - | **11** | **1.328.800** | **220** | **13** | **12** | **24.264.700** | **40** | **12%** | |
| | | | 2.Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK | **10** | | **0** | - | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** | | - | | **0** | | **0** | | |
| | | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah JRA yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati | **60** | **194.525.000** | **10** | **22.935.900** | 10 | **10.214.000** | 10 | - | 10 | **1.328.800** | 0 | - | 0 | - | **20** | **1.328.800** | **200** | **13** | **30** | **24.264.700** | **50** | **12%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan | **150** | **178.895.000** | **25** | **28.275.000** | 10 | **7.360.000** | 25 | - | 0 | - | 25 | - | 0 | - | **50** | - | **500** | - | **75** | **28.275.000** | **50** | **16%** | |
| | | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya | **150** | **178.895.000** | **25** | **28.275.000** | 25 | **7.360.000** | 25 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | **25** | - | **100** | - | **50** | **28.275.000** | **33,333** | **16%** | |
| 3 | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK | **2450** | **343.578.000** | **135** | **48.438.846** | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 135 | - | 0 | - | **135** | - | **39** | **#DIV/0!** | **270** | **48.438.846** | **11,02** | **14%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Keberadaan dan Keutuhan Arsip yang sesuai NSPK | **300** | **148.240.000** | **81** | **23.086.196** | 50 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 79 | - | **81** | - | **162** | **#DIV/0!** | **162** | **23.086.196** | **54** | **16%** | |
| | | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah arsip yang dialih mediakan | **2150** | **195.338.000** | **400** | **25.352.650** | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 350 | - | 50 | - | **400** | - | **133** | **#DIV/0!** | **800** | **25.352.650** | **37,209** | **13%** | |
| | | | | | | **0** | - | | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | |
| Vi. | | **Program Perizinan Penggunaan Arsip** | Persentase Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan | **25** | **125.000.000** | **1** | **22.081.000** | **0** | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | **1** | - | - | **#DIV/0!** | **2** | **22.081.000** | **8** | **18%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota* | Persentase Penyusunan SOP Kearsipan | **25** | **125.000.000** | **0** | **22.081.000** | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | **0** | - | - | **#DIV/0!** | **0** | **22.081.000** | **0** | **18%** | |
| | | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disusun | **25** | **125.000.000** | **0** | **22.081.000** | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | **0** | - | - | **#DIV/0!** | **0** | **22.081.000** | **0** | **18%** | |
| | | | | | | **0** | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan, dan menyelenggarakan serta mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya. Sementara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara/ pemerintahan daerah, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator- indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang elah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan kinerja utama. Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Adapun capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Arsip tahun 2025-2029 dapat kita lihat pada table berikut ini :

**Tabel TC 30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | | Tahun 2026 | | | Tahun 2027 | | | Tahun 2028 | | | Tahun 2029 | | | Tahun 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Meningkatnya Layanan Kearsipan | Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital | 20 | 20 | 100 | 23 | | | 25 | | | 30 | | | 35 | | | 35 | | |
| Meningkatnya Kualitas SDM | Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat | 15 | 15 | 100 | 20 | | | 20 | | | 25 | | | 25 | | | 25 | | |
| Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 78 | 79,20 | 101,54 | 79,5 | | | 80 | | | 80,5 | | | 81 | | | 81 | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2025 | | | Tahun 2026 | | | Tahun 2027 | | | Tahun 2028 | | | Tahun 2029 | | | Tahun 2030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Meningkatnya kualitas layanan Perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat | 70 | 56,74 | 81,06 | 70,5 | | | 71 | | | 71,5 | | | 72 | | | 72 | | |

**Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 : (sesuaikan dengan laporan LAKIP)**

| | |
|---|---|
| ***Indeks Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan Perpustakaan*** | |

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan perpustakaan merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan perpustakaan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Menurut Kepmen PAN No. 25 Tahun 2004 tentang indeks kepuasan masyarakat, ada 14 (empat belas) hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, antara lain prosedur pelayanan, kesesuaian persyaratan, keberadaan/kejelasan petugas, kedisiplinan petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan pelayanan, kesopanan petugas, kewajaran biaya, kepastian biaya, kepastian jadwal, kenyamanan lingkungan dan keamanan pelayanan.

Jadi dengan adanya indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat mengukur kinerja layanan perpustakaan setiap tahunnya. Untuk itu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan menjadi sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman.

Indeks kepuasan masyarakat layanan kepustakaan pada tahun 2025 realisasinya sebesar 97,5% dengan persentase capaian 97,5% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Terjadi sedikit penurunan capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Adanya berbagai faktor yang menyebabkan penurunan kinerja pada indikator ini adalah pengurangan anggaran urusan perpustakaan dan keterbatasan SDM untuk melakukan pelayanan perpustakaan kepada pengunjung perpustakaan.

Walaupun indikator ini tidak memenuhi target yang ditetapkan namun capaian 97,5% dikategorikan dengan interprestasi Berhasil. Karena capaian kinerja sudah berada di angka 97,5%. Meski adanya pengurangan anggaran urusan perpustakaan pada tahun 2025 namun komitmen kerja dari pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan khususnya bidang perpustakaan dalam

hal meningkatkan kepuasan layanan Kepustakaan tetap tinggi sehingga interprestasi Berhasil dapat dicapai pada tahun 2025.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh program Pembinaan Perpustakaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka, Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial serta Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestrasikan dan didayagunakan dimana secara umum output dari masing-masing sub kegiatan tersebut adalah untuk melengkapi sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang ada di Perpustakaan Umum Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepustakaan di lingkungan Kab. Padang Pariaman.

## *Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat*

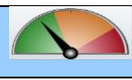

Membaca pada dasarnya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Membaca sudah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dari kehidupan sehari-hari. Kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2007 tentang perpustakan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam konteks ini, peningkatan minat baca masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertujuan untuk melihat sejauh mana minat, kebiasaan, dan akses masyarakat terhadap aktivitas membaca. TGM ini digunakan oleh Perpustakaan untuk menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota. Komponen pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca terdiri dari dimensi pra membaca, saat membaca dan pasca membaca dengan masing-masing bobot untuk Pra membaca 15%, Saat membaca 50% dan Pasca membaca 35%.

## *Indeks Kearsipan (ANRI)*

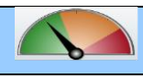

Nilai indeks pengelola arsip eksternal (LAKE) merupakan program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola kearsipan secara nasional. Kegiatan ini mulai dilaksanakan oleh pemerintah pusat pada tahun 2017 sampai pada saat sekarang ini. ANRI melakukan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN) berdasarkan LAKE dan LAKI paling lambat pada 30 november setiap tahun anggaran.

Adapun bentuk instrument audit kearsipan antara lain ; formulir audit kearsipan, wawancara dan verifikasi lapangan. Tim pengawas kearsipan memberikan nilai atas hasil pengawasan kearsipan yang dituangkan dalam LAKE dan LAKI dengan predikat nilai buruk, kurang, cukup, baik, sangat baik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Sumbar melakukan penilaian kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/ Kota di lingkungan Prov. Sumbar. LKD Prov. Sumbar akan langsung di nilai oleh Arsip Nasional Republik Indonesia setiap tahunnya.

Nilai LAKE ini merupakan salah satu indikator Reformasi Birokrasi dari Kemenpan-RB Republik Indonesia. Agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan Reformasi Birokrasi tentunya nilai LAKE Kabupaten Padang Pariaman harus mendapatkan predikat sangat baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

## *Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan & Perpustakaan dari Inspektorat*

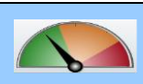

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansi nya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMD.

Setiap tahunnya Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang mana juga diberikan penilaian dan peringkat atas Implementasi SAKIP yang diterapkan di masing-masing Perangkat Daerah.

**Capaian Indikator Kinerja Daerah**

**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025**

| No | IKD | Satuan | Target Capaian 2025 | Realisai tw 1 2025 | Realisai tw 2 2025 | Realisai tw 3 2025 | Realisai tw 4 2025 | ANALISIS CAPAIAN KINERJA (PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERPUSTAKAAN** | | | | | | | |
| 17.1 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72 | 0 | 0 | 0 | 7,79 | Nilai yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional RI |
| 17.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan | Indeks | 97,5 | 0 | 0 | 0 | 97,5 | Nilai IKM menggunakan nilai rata-rata tertimbang dengan masing-masing unsur pelayanan yakni 1. Bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan 2. Bagaimana ketersediaan koleksi bahan pustaka 3. Bagaimana kenyamanan ruangan perpustakaan dan 4. Bagaiman ketersediaan sarana pendukung, ruang baca, toilet dan mussala.Survey dilakukan dengan menggunakan aplikasi INLIs Lite. |
| 17.3 | Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk | Rasio | 3,5 | 59,1 | 0 | 0 | 71,48 | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan datanya diambil berdasarkan jumlah koleksi masing-masing jenis perpustakaan. Perpusda, Perpustakaan Sekolah, Nagari, TBM dan Perpustakaan Khusus |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat | % | 0,6 | 1.96 | 0,57 | 0,94 | 10.05 | Persentase Kemanfaatan Perpustakaan datanya diambil dari jumlah kunjungan Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Nagari |
| 17.5 | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk | Rasio | 0,3 | 0,87* | 0,92 | 0,97 | 1,06 | Data berdasarkan pada data Pendataan Perpustakaan yang dilakukan dalam aplikasi data.pusnas.go.id |
| 17.6 | Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | % | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 31.19 | Data berdasarkan pada data Pendataan Perpustakaan yang dilakukan dalam aplikasi data.pusnas.go.id |
| 17.7 | Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar | % | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | Data didapat dari hasil koordinasi di lapangan dengan ahliwaris pemilik naskah |
| 17.8 | Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | % | 0,08 | 1,96 | 0,57 | 0,94 | 10.05 | Data berdasarkan pada statistik kunjungan yang dilakukan setiap bulannya |
| 17.9 | Persentase Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | % | 0,54 | 49,55* | 49,55 | 49,55 | 49.12 | Koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah |
| 17.10 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | Ratio | 1,1 | 0,13* | 0,14 | 0,14 | 1,54 | Jumlah seluruh perpustakaan baik Perpustakaan Daerah, Nagari, Khusus bahkan TBM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman |
| 17.11 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | Jumlah (Org) | 24.551 | 1.022 | 17.602 | 26.981 | 45.787 | Data berdasarkan pada statistik kunjungan yang dilakukan setiap bulannya |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | Jumlah | 6.384 | 294781* | 294.781 | 294.781 | 325.432 | Koleksi buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah meliputi Perpustakaan Nagari, Seolah, Khusus dan juga TBM |
| 17.13 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | Orang | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Jumlah tenagan Pustakawan (bukan teknis) yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah Kab. Padang Pariaman |

| No | IKD | Satuan | Target 2025 | Realisai tw 1 2025 | Realisai tw 2 2025 | Realisai tw 3 2025 | Realisai tw 4 2025 | ANALISIS CAPAIAN KINERJA (PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KEARSIPAN** | | | | | | | |
| 18.1 | Indeks kearsipan Eksternal | Indeks | 68,5 | 0 | 0 | 0 | B (66,06) | Nilai yang dikeluarkan oleh ANRI. Realisasi nilai LAKE Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sebesar 66,06 turun jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2025 yakni 70,11 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik | % | 20,93 | 0 | 0 | 33 | 0 | Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah Dalam Penataan, Pengelolaan Kearsipan |
| 18.3 | Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan. | % | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belum Adanya SKKAD (Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis) sebagai dasar/regulasi Perbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berupa peraturan kepala daerah dan karena masih dalam tahap pengajuan harmonisasi (masih dalam bentuk draf Rancangan Peraturan Bupati tentang SKKAD) |
| 18.4 | Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan | % | 65 | 20 | 10 | 10 | 25 | Penyelamatan Arsip dilakukan di Lembaga Kearsipan Daerah dengan Persentase 40% |
| 18.5 | Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan | % | 60 | 20 | 10 | 10 | 20 | Pengalihmediaan Arsip Statis yang dilakukan di LKD yang terdapat pada Aplikasi Srikandi dan alihmedia arsip statis OPD |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | Orang | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tidak adanya penambahan SDM Pengelola Kearsipan |

## 2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Bidang-Bidang per urusan dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman.

Identifikasi permasalahan pada perangkat daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dari bab II yang telah di paparkan terdahulu terdapat capaian kinerja perangkat daerah yang dapat kita telaah dari capaian kinerja tersebut, permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan terkendalanya dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Masih terbatasnya akses perpustakaan dan fasilitas belajar di nagari-nagari.
b. Kurangnya program literasi yang terintegrasi dengan budaya lokal dan kegiatan sehari-hari masyarakat
c. Rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membiasakan budaya membaca dan belajar
d. Keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitator literasi yang memahami karakteristik budaya dan bahasa daerah minangkabau
e. Minimnya dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan literasi berbasis teknologi dan digital di tingkat nigari dan sekolah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi menggiring perpustakaan ke arah digital dengan mengembangkan sistem ebook dan konvesional
2. Pembudayaan kegiatan membaca dengan memberdayakan penggiat literasi
3. Memberi perhatian dan dukungan lebih dalam peningkatan pengelolaan dan layanan perpustakaan dengan melengkapi sarana prasarana dan instrumen lain yang dibutuhkan untuk akreditasi sesuai SNP
4. Meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dengan menggiatkan kegiatan literasi berbasis inklusi sosialPeningkatan Budaya Gemar Membaca
5. Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA)
6. Mewujudkan penataan arsip OPD yang baik sebagai salah satu instrumen penilaian LAKE LKD
7. Menyiapkan gedung galeri arsip statis dan sarana prasarana pendukung serta memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan informasi kearsipan secara digital

Tabel Pagu Indikatif 2025

| RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | | | | | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Catatan Penting |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat** | **BB (79)** | **3.287.423.840** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | **Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat** | **BB (79)** | **3.287.423.840** | |
| 2,01 | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu<br>2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah** | **1. 3 Dokumen<br>2. 12 laporan** | 30.000.000 | 2,01 | | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **1. Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu<br>2. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah** | **1. 3 Dokumen<br>2. 12 laporan** | 30.000.000 | |
| 2,01 | 01 | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 15.000.000 | 2,01 | 01 | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 06 | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 dokumen | 15.000.000 | 2,01 | 06 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 dokumen | 15.000.000 | |
| **2,02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan** | **13 Laporan** | 3.086.600.000 | **2,02** | | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan** | **13 Laporan** | 3.086.600.000 | |
| 2,02 | 01 | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26/14 orang/bulan | 3.000.000.000 | 2,02 | 01 | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 26/14 orang/bulan | 3.000.000.000 | |
| 2,02 | 02 | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 14 Dokumen | 81.600.000 | 2,02 | 02 | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 14 Dokumen | 81.600.000 | |
| 2,02 | 05 | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13 Laporan | 5.000.000 | 2,02 | 05 | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 13 Laporan | 5.000.000 | |
| **2,05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat<br>Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala<br>Jumlah SKP ASN<br>Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP** | **5 Orang<br>10 Orang<br>26 Orang<br>26 Orang** | | **2,05** | | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat<br>Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala<br>Jumlah SKP ASN<br>Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP** | **5 Orang<br>10 Orang<br>26 Orang<br>26 Orang** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,05 | 08 | | | Jumlah ASN yang dipindah tugaskan | 5 Orang | | 2,05 | 11 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| 2,05 | 11 | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 2 Orang | | 2,05 | 11 | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | |
| **2,06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi** | **100%** | | **2,06** | | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi** | **100%** | 388.234.000 | |
| 2,06 | 06 | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | 2,06 | 02 | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | | |
| 2,06 | 08 | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | 2,06 | 03 | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | | |
| 2,06 | 09 | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | 2,06 | 05 | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | | |
| 2,06 | 10 | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | | 2,06 | 06 | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,08 | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia<br>2. Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan** | **100%** | 170.823.840 | 2,08 | | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **1. Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia<br>2. Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan** | **100%** | 170.823.840 | |
| 2,08 | 01 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.000.000 | 2,08 | 01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.000.000 | |
| 2,08 | 02 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 48.000.000 | 2,08 | 02 | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 48.000.000 | |
| 2,08 | 04 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 107.823.840 | 2,08 | 04 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 107.823.840 | |
| 2,09 | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | | | 2,09 | | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah** | | | |
| 2,09 | 06 | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | | 2,09 | 06 | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | | |
| 2,09 | 09 | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | | 2,09 | 09 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | **Tingkat Ketersediaan Arsip** | **68%** | **52.000.000** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | **Tingkat Ketersediaan Arsip** | **68%** | **52.000.000** | |
| 2,01 | | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip** | | 22.000.000 | 2,01 | | | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | | **1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br>2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip** | | 22.000.000 | |
| 2,01 | 01 | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 7000 Naskah Dinas | 10.000.000 | 2,01 | 01 | | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 7000 Naskah Dinas | 10.000.000 | |
| 2,01 | 03 | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Laporan | 12.000.000 | 2,01 | 03 | | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Laporan | 12.000.000 | |
| 2,01 | 05 | | | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 1 OPD | | 2,01 | 05 | | | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 1 OPD | | |
| 2,01 | 10 | | | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 25 OPD | | | 10 | | | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis | 25 OPD | | |
| 2,02 | | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **1. Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi** | | 10.000.000 | 2,02 | | | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | | **1. Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi** | | 10.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,02 | 02 | | | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 60 arsip statis | 10.000.000 | 2,02 | 02 | | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 60 arsip statis | 10.000.000 | |
| 2,03 | | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | **Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN** | | 20.000.000 | 2,03 | | | **Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** | | **Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN** | | 20.000.000 | |
| 2,03 | 01 | | | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 1 Layanan | 20.000.000 | 2,03 | 01 | | | Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 1 layanan | 20.000.000 | |
| | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | **Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | | | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | **Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | | | |
| 2,01 | | | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | **Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK** | | | 2,01 | | | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | | **Jumlah Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 01 | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | 2,01 | 01 | | | Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | |
| 2,01 | 02 | | | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | | | 2,01 | 02 | | | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | | | |
| 2,02 | | | **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota** | **Jumlah Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK** | | | 2,02 | | | **Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK** | | | |
| 2,02 | 01 | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | 2,02 | 01 | | | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | |
| 2,02 | 02 | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | 2,02 | 02 | | | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | | | |
| 2,03 | | | **Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah** | **Jumlah Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah** | | | 2,03 | | | **Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan** | | **Jumlah Kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Kecamatan dan Desa/Kelurahan** | **kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota** | | | | | | | **yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota** | | | |
| 2,03 | 01 | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2,03 | 01 | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | | | | | | | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | | | |
| 2,03 | 04 | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | 2,03 | 04 | | | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,04 | | | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | **Jumlah Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK** | | | 2,04 | | | **Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK** | | | |
| 2,04 | 01 | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | | | 2,04 | 01 | | | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan | | | |
| 2,04 | 02 | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | 2,04 | 02 | | | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | |
| 2,05 | | | **Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang** | **Jumlah Kegiatan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK** | | | 2,05 | | | **Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang** | | **Jumlah Kegiatan Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK** | | | |
| 2,05 | 01 | | | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | | | 2,05 | 01 | | | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,05 | 02 | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | 2,05 | 02 | | | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang | | | |
| 2,05 | 03 | | | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | | | 2,05 | 03 | | | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman | | | |
| | | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | **Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup** | **7** | | | | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | | **Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup** | **7** | | |
| 2,01 | | | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota** | **Jumlah Kegiatan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK** | | | 2,01 | | | **Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota** | | **Jumlah Kegiatan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK** | | | |
| 2,01 | 01 | | | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | SOP | | 2,01 | 01 | | | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | SOP | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 02 | | | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 1 Daftar arsip | | 2,01 | 02 | | | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 1 Daftar arsip | | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca** | **72** | **245.576.160** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | **Nilai Tingkat Kegemaran Membaca** | **72** | **245.576.160** | |
| 2,01 | | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1.Rasio ketercukupan koleksi Perpustakaan dengan penduduk 2.Rasio ketercukupan tenaga Perpustakaan dengan penduduk 3. Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan** | | 170.000.000 | 2,01 | | | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **1.Rasio ketercukupan koleksi Perpustakaan dengan penduduk 2.Rasio ketercukupan tenaga Perpustakaan dengan penduduk 3. Persentase Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan** | | 170.000.000 | |
| 2,01 | 01 | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 20 pustaka | 15.000.000 | 2,01 | 01 | | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK | 20 pustaka | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 02 | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 50 pustaka | 60.000.000 | 2,01 | 02 | | | Pengembangan Perpsutakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 50 pustaka | 60.000.000 | |
| 2,01 | 04 | | | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 15 Perpustakaan | 20.000.000 | 2,01 | 04 | | | Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 15 Perpustakaan | 20.000.000 | |
| 2,01 | 05 | | | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | 2,01 | 05 | | | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | |
| 2,01 | 06 | | | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | 2,01 | 06 | | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 2,01 | 07 | | | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | | | 2,01 | 07 | | | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | 08 | | | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | | 50.000.000 | 2,01 | 08 | | | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | | 50.000.000 | |
| 2,01 | 09 | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 500 EKS | 10.000.000 | 2,01 | 09 | | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 500 EKS | 10.000.000 | |
| 2,01 | 10 | | | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 1 Laporan | 15.000.000 | 2,01 | 10 | | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan | 1 Laporan | 15.000.000 | |
| 2,02 | | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **1. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat<br>2. Persentase kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat** | | 75.576.160 | 2,02 | | | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **1. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat<br>2. Persentase kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat** | | 75.576.160 | |
| 2,02 | 01 | | | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 1 Lokus | 15.000.000 | 2,02 | 01 | | | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 1 Lokus | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,02 | 02 | | | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat_x005fTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | 2,02 | 02 | | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat_x005fTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 2,02 | 03 | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 12 Orang | 30.000.000 | 2,02 | 03 | | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 12 Orang | 30.000.000 | |
| 2,02 | 04 | | | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 1 Layanan | 15.000.000 | 2,02 | 04 | | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan | 1 Layanan | 15.000.000 | |
| 2,02 | 05 | | | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | 2 Orang | 15.576.160 | 2,02 | 05 | | | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya | 2 Orang | 15.576.160 | |
| | | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki** | **14%** | **15.000.000** | | | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | **Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki** | **14%** | **15.000.000** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 | | | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** | **1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya<br>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa** | 10 naskah kuno | 15.000.000 | 2,01 | | | **Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** | | **1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya<br>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa** | 10 naskah kuno | 15.000.000 | |
| 2,01 | 01 | | | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | | | 2,01 | 01 | | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | | | |
| 2,01 | 02 | | | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 20 NASKAH KUNO | 15.000.000 | 2,01 | 02 | | | Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 20 NASKAH KUNO | 15.000.000 | |
| 2,02 | | | **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)** | | | 2,02 | | | **Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | | **Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,02 | 01 | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | | | 2,02 | 01 | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang tersimpan dan atau Terdaftar | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan | | | |
| 2,02 | 02 | | | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan | | | 2,02 | 02 | | | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan | | | |

### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Rencana kerja Perubahan (renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indicator makro, indicator ekonomi dan social.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang merupakan sinergitas perencanaan mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Perangkat Daerah,maka tahun 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak ada usulan skala prioritas dari hasil musrenbang. Adapun Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana tahun 2025 berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, agar mampu membuat perencanaan yang lebih baik, sehingga mampu untuk merumuskan program dan kegiatan untuk Kesejahteraan masyarakat.

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Namun dalam proses ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

**TABEL 2.10**

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARSAN/VOLUME | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | TIDAK ADA | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# BAB III
# TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Dinas, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Dinas perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2021-2026

Tabel 3.1

Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

| No | Visi RPJMN Tahun 2025-2029 | Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 | Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|
| **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** | | **Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan** | **Padang Pariaman Maju dan Sejahtera** |
| 1. | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas |
| 2. | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru | Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan | Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing |
| 3 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan | Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata |
| 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, | Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat | Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan |

| No | Visi RPJMN Tahun 2025-2029 | Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 | Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 |
|---|---|---|---|
| **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** | | **Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan** | **Padang Pariaman Maju dan Sejahtera** |
| | kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas | | |
| 5 | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana | Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan | Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas | |
| 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan | Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM | |
| 8 | Memperkuat penyelasaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif | |

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

**Tabel 3.2**

**Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

| No | Agenda/Prioritas Nasional | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025 | Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Tema** | **Tema** | **Tema** |
| 1. | Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia | Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosal kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat | Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" |
| 2. | Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan |
| | | Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital | |
| | | Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan | |
| | | Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | |
| 3. | Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah |
| | | Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan | Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar |
| | | Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | |
| 4. | Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, | Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing | Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial |

| No | Agenda/Prioritas Nasional | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025 | Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Tema** | **Tema** | **Tema** |
| | prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | |
| 5. | Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan |
| | | Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital | |
| 6. | Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan |
| | | Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital | |
| | | Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan | |
| 7. | Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel |

| No | Agenda/Prioritas Nasional | Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera BaratTahun 2025 | Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025 |
|---|---|---|---|
| | **Tema** | **Tema** | **Tema** |
| 8. | Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah | Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah |

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu Padang Pariaman Maju dan Sejahtera dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan termasuk dalam Misi ke-I yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Berintegrasi dan Misi ke-II yakni Menciptakan SDM Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Adapun Rumusan Tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Untuk Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas
2. Meningkatnya tata kelola arsip
3. Meningkatnya literasi masyarakat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan di capai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang. Sasaran didalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas SDM
2. Meningkatnya Layanan Kearsipan

3. Meningkatnya Layanan Perpustakaan

4. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perspustakaan**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan dan Sasaran | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir (2030) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. | | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | | 78 | 79.50 | 80 | 80,5 | 81 | 81 |
| | | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | | 78 | 79.50 | 80 | 80,5 | 81 | 81 |
| 2 | Meningkatnya literasi masyarakat | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Meningkatnya Layanan Perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat | | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 3 | Meningkatnya tata kelola arsip | | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah | | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 75 | 75 |
| | | Meningkatnya Kualitas SDM | Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat | | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| | | Meningkatnya Layanan Kearsipan | Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital | | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 35 |

Tabel 3.5

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja

Dinas Kersipan dan Perpustakaan Padang Pariaman Tahun 2025

| Visi | Misi | Tujuan OPD | Indikator Tujuan OPD | Target 2025 | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padang Pariaman Maju dan Sejahtera | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas | Meningkatnya Kualitas tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah | 71,4 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 78,00 |
| | | Meningkatnya tata kelola arsip | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah | 71 | Meningkatnya Kualitas SDM | Persentase pustakawan dan arsiparis yang bersertifikat | 15 |
| | | | | | Meningkatnya Layanan Kearsipan | Persentase dokumen arsip dalam bentuk digital | 20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatnya literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | 5 | Meningkatnya Layanan Perpustakaan | Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat | 59 |

**Tabel 3.6**

**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

| NO | Indikator Kinerja Kunci | SATUAN | TARGET 2025 | KET |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | % | 67 | |
| 2 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | % | 59 | |
| 3 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | % | 5 | |

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah strategi dan kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan . Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan .

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Peningkatan Sistem dan Teknologi Kearsipan
3. Pelaksanaan Pengawasan yang Berkelanjutan dan Efektif
4. Perluasan dan Diversifikasi Akses Bacaan

5. Inovasi Program Literasi yang Menarik
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi

## 3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin Perangkat Daerah, pada tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyelenggarakan 2 (Dua) Urusan Wajib bukan pelayanan Dasar, yaitu Urusan perpustakaan dan kearsipan, yang secara keseluruhan meliputi 6 program, 19 kegiatan, dan 70 subkegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp4.833.627.964,- Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 pada table Matrix Renja 2026:

**Tabel Matrix Renja 2025 (TC.33)**

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra 2025-2029**

**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman**

**Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 |
| **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **3.700.000.000,00** | | **10.000.000,00** | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.700.000.000,00** | | **10.000.000,00** | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **250.000.000,00** | | **0** | |
| **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **235.000.000,00** | **-** | **0** | |
| **[ Nilai Tingkat Kegemaran Membaca ]** | **Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat** | **76** | **69.59** | **70** | **72** | **235.000.000,00** | - | **0** | - |
| Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan* | - | | | 40 15 25 % | 185.000.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Aplikasi berbasis IT, Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka, dan persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan* | | | | | | | | DAN PERPUSTAKAAN |
| Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 15 Perpustakaan | 20.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya* | | | | 50 Perpustakaan | 90.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi* | | | | 0 Layanan | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai* | | | | 20 Perpustakaan | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | | | | | DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | | | | | | | |
| | *Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/ digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat* | | | | 0 Eksemplar | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | | | | | | | | | |
| | *Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi* | | | | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 500 Eksemplar | 40.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 0 Eksemplar | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK* | | | | 20 Perpustakaan | 10.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah penghargaan kegemaran membaca Jumlah pelibatan kegiatan masyarakat di Perpustakaan wilayah Kabupaten Padang Pariaman* | - | | | 18<br>Penghargaan 400 Orang | 50.000.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah* | | | | 1 Orang | 15.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya* | | | | | | | | |
| Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan* | | | | 5 Perpustakaan | 15.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 9 Orang | 20.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 2 Lokus | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | **15.000.000,00** | **-** | **0** | |
| **[ Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki ]** | **Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki** | **22** | **10** | **12** | **14** | **15.000.000,00** | - | **0** | - |
| Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia* | - | | | 20 Eksemplar | 15.000.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *(digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya* | | | | | | | | |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | |
| | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno* | | | | 0 Orang | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | 20 Eksemplar | 15.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya* | - | | | 5 Eksemplar | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 5 Eksemplar | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 0 Eksemplar | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **3.450.000.000,00** | | **10.000.000,00** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | | | **3.350.000.000,00** | **-** | **0** | |
| **[ Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.350.000.000,00** | - | **0** | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 49.759.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 24.754.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan* | | | | 10 Laporan | 25.005.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 3.096.241.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25/14 Orang/bulan | 3.004.641.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 81.600.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 10.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan* | | | | 25 Orang | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | | | | | DAN PERPUSTAKAAN |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 50.000.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 Persen | 154.000.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 46.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 108.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | - | | | 100 Persen | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | **79.999.500,00** | **-** | **0** | |
| **[ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ]** | **Tingkat Ketersediaan Arsip** | **72** | **66.49** | **67** | **68** | **79.999.500,00** | - | **0** | - |
| Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi Persentase pengelola* | - | | | 50 Persen | 50.000.000,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | *Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis* | | | | 50 Persen | | | | |
| | *Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku* | | | | 85 Persen | | | | |
| Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan* | | | | 7000 Berkas | 20.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | | | | 5 Berkas | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 26 Laporan | 20.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | | | | | | | | | |
| | *Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis* | | | | 0 Unit | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan* | | | | 1 Lembaga | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip | | | | | | | | | |
| | *Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip* | | | | 0 Lembaga | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi* | | | | 0 Laporan | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *penyelenggaran kearsipan* | | | | | | | | DAN PERPUSTAKAAN |
| Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis* | | | | 25 Instansi | 10.000.000,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi* | - | | | 20 Persen | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI* | | | | 5 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 60 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN* | - | | | 10 Persen | 29.999.500,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 43 Pengguna | 29.999.500,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Laporan | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | | **20.000.500,00** | **-** | **10.000.000,00** | |
| **[ Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ]** | **Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | **73** | **57** | **58** | **61** | **20.000.500,00** | - | **10.000.000,00** | - |
| Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | *Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK*<br>*Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan* | - | | | 10 Persen<br>2 Perbup | 20.000.500,00 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di* | | | | 20 Berkas | 20.000.500,00 | | 0 | DINAS KEARSIPAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan* | | | | | | | | DAN PERPUSTAKAAN |
| Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun* | | | | 25 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | *Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang sesuai NSPK* | - | | | 5 Persen | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 20 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 20 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | *Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan* | - | | | 25 Nagari | 0 | - | 10.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan* | | | | 100 Arsip | 0 | | 10.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | *Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK* | - | | | 240 Berkas | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan* | | | | 0 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip* | | | | 0 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.000.500,00** | - | **10.000.000,00** | - |
| Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | *Jumlah Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan* | - | | | 2 Berkas | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang* | | | | 0 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Dilakukan Penetapan dan Pengumuman* | | | | | | | | DAN PERPUSTAKAAN |
| **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | | | | | **0** | **-** | **0** | |
| **[ Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | - | **0** | - |
| Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | *Persentase Layanan Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup* | - | | | 5 Persen | 0 | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | |
| | *Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan* | | | | 5 SOP | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup* | | | | 150 Arsip | 0 | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | **3.700.000.000,00** | | **10.000.000,00** | |

Adapun program dan kegiatan Urusan Kearsipan dan Perpustakaan yang diorientasikan pada layanan public dan sesuai dengan Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

1. Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konslutasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**II. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
   2) Pengembangan Perpustakaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi

4) Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan

5) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

6) Penyusunan Data Dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat

2) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

3) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

4) Pemilihan Duta baca Tingkat Daerah

**III. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**

1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

1) Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan Minat dan Budaya Baca

2) Pengembangan, Pengolahan Dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan Dan Didayagunakan

2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah daerah kabupaten.kota

1) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

2) Pengelolaan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

**IV. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

3) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

4) Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

5) Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepala ANRI

2) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN

2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota

**V. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**

1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

1) Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

2) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

1) Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana

2) Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

3. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

1) Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Keluharan

4. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

1) Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

5. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

1) Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

**VI. PROGRAM PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP**

1. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota

1) Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

2) Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 ditunjukkan pada lampiran sebagai berikut:

Matrix Renja 2026

| URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TARGET 2026 | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | KELOMPOK SASARAN | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **3.700.000.000,00** | | | | | | | **10.000.000,00** | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3.700.000.000,00** | | | | | | | **10.000.000,00** | |
| **URUSAN PEMERINTA** | | | | | | **250.000.000,00** | | | | | | | **0** | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | | | | | | **235.000.000,00** | | | | | | **-** | **0** | |
| **[ Nilai Tingkat Kegemaran Membaca ]** | **Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat** | **76** | **69.59** | **70** | **72** | **235.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0** | - |
| Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT, Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka, dan persentase* | - | | | 40 15 25 % | 185.000.000,00 | | | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningka tk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahu an | Kabupate n Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *kunjungan Pemustaka ke perpustakaan* | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan* | | | | 15 Perpustak aan | 20.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | | | Kel/Desa | | | Berpengetahuan | | | | |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenanganny a* | | | | 50 Perpust ak aan | 90.000.000 ,00 | Kab. Padang Pariam an, Semua Kecama tan, Semua Kel/De sa | DANA OTONOM I KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningka tk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahu an | Kabupate n Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAK AAN |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptа kan Sumber Daya Manusia yang Berkualit as dan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Berdaya Saing | | | | |
| Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi* | | | | 0 Layanan | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam* | | | | 20 Perpustak aan | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | | | Kel/Desa | | | Berpengetahuan | | | | |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/ digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat* | | | | 0 Eksemplar | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Berdaya Saing | | | | |
| Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi* | | | | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga* | | | | 0 Orang | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningka tk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | | | Kel/Desa | | | Berpengetahuan | | | | |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Data dan informasi Perpustakaan* | | | | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Berdaya Saing | | | | |
| Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 500 Eksemplar | 40.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 0 Eksemplar | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningka tk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Kel/Desa | | | Berpengetahuan | | | | | |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | | |
| Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK* | | | | 20 Perpustak aan | 10.000.000 ,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Berdaya Saing | | | | |
| Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah penghargaan kegemaran membaca Jumlah pelibatan kegiatan masyarakat di Perpustakaan wilayah Kabupaten Padang Pariaman* | - | | | 18<br><br>Penghargaan 400 Orang | 50.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya* | | | | 1 Orang | 15.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kot* | | | | 5 Perpustaka an | 15.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *a yang dikembangkan* | | | | | | Kel/Desa | | | Berpengetahuan | | | | |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 9 Orang | 20.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Berdaya Saing | | | | |
| | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat* | | | | 2 Lokus | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI** | | | | | | **15.000.000,00** | | | | | | **-** | **0** | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **[ Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki ]** | **Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki** | **22** | **10** | **12** | **14** | **15.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0** | - |
| Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayahnya* | - | | | 20 Eksemplar | 15.000.000,00 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno* | | | | 0 Orang | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmedia* | | | | 20 | 15.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *an untuk dilestarikan dan didayagunakan* | | | | | | Kel/Desa | | | Berpengetahuan | | | | |
| | | | | | Eksemplar | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya* | - | | | 5 Eksemplar | 0 | | | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Berdaya Saing | | | | |
| Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 5 Eksemplar | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |
| Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan* | | | | 0 Eksemplar | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Daerah Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | | | Kel/Desa | | | Berpengetahuan | | | | |
| | | | | | | | | | sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | , Terampil dan Berdaya Saing | | | | |
| | | | | | | | | | | 2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **3.450.000.000,00** | | | | | | | **10.000.000,00** | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA** | | | | | | **3.350.000.000,00** | | | | | | **-** | **0** | |
| **[ Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dari Inspektorat ]** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.350.000.000,00** | - | - | - | - | - | - | **0** | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 49.759.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 24.754.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 10 Laporan | 25.005.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 3.096.241.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 25/14 | 3.004.641.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | Orang/bulan | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 12 Dokumen | 81.600.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan<br>. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas<br>5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 25 Orang | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah* | - | | | 100 Persen | 50.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | | | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 50.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan<br>. | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | - | | | 100 Persen | 154.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 46.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 108.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah* | - | | | 100 Persen | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan<br>. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas<br>5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | | | | | | **79.999.500,00** | | | | | | **-** | **0** | |
| | **[ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ]** | **Tingkat Ketersediaan Arsip** | **72** | **66.49** | **67** | **68** | **79.999.500,00** | - | - | - | - | - | - | **0** | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan peserta bimtek yang lulus ujian sertifikasi Persentase pengelola* | - | | | 50 Persen | 50.000.000,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | *Kearsipan yang menguasai Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis* | | | | 50 Persen | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | *Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku* | | | | 85 Persen | | | | | | | | | |
| Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan* | | | | 7000 Berkas | 20.000.000 ,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan | Mewujud ka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayana n Publik Yang Bersih, Akuntabe l Serta Berkualit as | Kabupate n Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAK AAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujud kan Kehidupa n Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbuday a | | | | |
| | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan* | | | | 5 Berkas | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 26 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis* | | | | 0 Unit | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan* | | | | 1 Lembaga | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip* | | | | 0 Lembaga | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan* | | | | 0 Laporan | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis* | | | | 25 Instansi | 10.000.000,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Arsip Statis yang diolah, diakuisisi dan di preservasi* | - | | | 20 Persen | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI* | | | | 5 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 60 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | *Persentase peningkatan layanan SIKN/JIKN* | - | | | 10 Persen | 29.999.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | | | | | |
| Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 43 Pengguna | 29.999.500,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan<br>. | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Laporan | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | | | | | | **20.000.500,00** | | | | | | **10.000.000,00** | |
| | **[ Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip ]** | **Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** | **73** | **57** | **58** | **61** | **20.000.500,00** | - | - | - | - | - | - | **10.000.000,00** | - |
| | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | *Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan* | - | | | 10 Persen | 20.000.500,00 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 Perbup | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan* | | | | 20 Berkas | 20.000.500 ,00 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun* | | | | 25 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | *Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang sesuai NSPK* | - | | | 5 Persen | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 20 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana* | | | | 20 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan | *Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan* | - | | | 25 Nagari | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 10.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desa/Kelurahan | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan* | | | | 100 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 10.000.000,00 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | *Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK* | - | | | 240 Berkas | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan* | | | | 0 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip* | | | | 0 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| - | - | - | - | - | - | **20.000.500,00** | - | - | - | - | - | - | **10.000.000,00** | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | *Jumlah Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan* | - | | | 2 Berkas | 0 | | | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman* | | | | 0 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | **PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP** | | | | | | **0** | | | | | | **-** | **0** | |
| | **[ Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan arsip yang bersifat tertutup ]** | - | - | - | - | - | **0** | - | - | - | - | - | - | **0** | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | *Persentase Layanan Penggunaan Arsip Bersifiat Tertutup* | - | | | 5 Persen | 0 | | | Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan | Mewujud ka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayana n Publik Yang Bersih, Akuntabe l Serta Berkualit as | Kabupate n Padang Pariaman | - | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAK AAN |
| | | | | | | | | | | . | 5. Mewujud kan Kehidupa n Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbuday a | | | | |
| | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan* | | | | 5 SOP | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup* | | | | 150 Arsip | 0 | Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas | Kabupaten Padang Pariaman | | 0 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| | | | | | | | | | . | 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya | | | | |
| | | | | | | **3.700.000.000,00** | | | | | | | **10.000.000,00** | |

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2026. Renja Perubahan akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman s tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra -PD) Tahun 2025-2029 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Padang Pariaman.

2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.

3. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.

4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik

Harapan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah semoga dapat mendorong tercapainya cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Melalui upaya tersebut, diharapkan terjadi kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, kami harapkan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pelaksanaan penyelenggaraan program pembangunan dan pemerintahan

Pariaman,20 September 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dra.SUMARNI,M.Pd
Pembina Utama Muda/NIP.196810231993032002

# HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
# DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN

| NO | NAMA DOKUMEN | HASIL PRA EVALUASI |
|---|---|---|
| 1. | RPJMD Priode 2025 – 2029 | |
| 2. | Renstra Priode 2025 – 2029 | |
| 3. | Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029 | |
| 4. | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | |
| 5. | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 | |
| 6. | Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | |
| 7. | LKJiP Tahun 2025 | |
| 8. | Rencana Aksi Tahun 2025 | |
| 9. | Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025 | |
| 10. | Rencana Aksi Tahun 2026 | |
| 11. | IKU Priode 2025-2029 | |
| 12. | Renja Tahun 2025 | |
| 13. | Renja Perubahan Tahun 2025 | |
| 14. | Renja Tahun 2026 | |
| 15. | Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026 | |
| 16. | Pedoman Teknis Perencanaan 2026 | |
| 17. | Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026 | |
| 18. | Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026 | |
| 19. | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 | |
| 20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025 | |
| 21. | SOTK | |

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

(SUNARIYATI, SE )

| REVISI BERJENJANG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketua Tim | | Dalnis | | Wanjab | |
| Tanggal | Paraf | Tanggal | Paraf | Tanggal | Paraf |
| 25/06-26 | | 25/06-26 | | 25/06-26 | |